



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Sidang	: II
Rapat	: Ke -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 28 Januari 2015
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Kementerian Perhubungan.
Ketua Rapat	: Michael Wattimena, SE, MM
Sekretaris	: Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
Hadir Anggota	: dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan pada hari ini adalah untuk membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Kementerian Perhubungan.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan untuk memaparkan dan menyampaikan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberi apresiasi kepada Kementerian Perhubungan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Kementerian Perhubungan dapat mempertahankan opini tersebut.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan peran pengawas internal dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara di Kementerian Perhubungan, termasuk menertibkan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Kementerian Perhubungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara, sehingga temuan-temuan BPK yang serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.
3. Komisi V DPR RI mendukung upaya Menteri Perhubungan untuk melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan dalam rangka penyegaran, transparansi dan peningkatan kinerja Kementerian Perhubungan.
4. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk segera menyelesaikan beberapa temuan dan menyampaikan evaluasi kepada Komisi V DPR RI dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 28 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,

TTD

IGNASIUS JONAN

KETUA RAPAT,

TTD

MICHAEL WATTIMENA